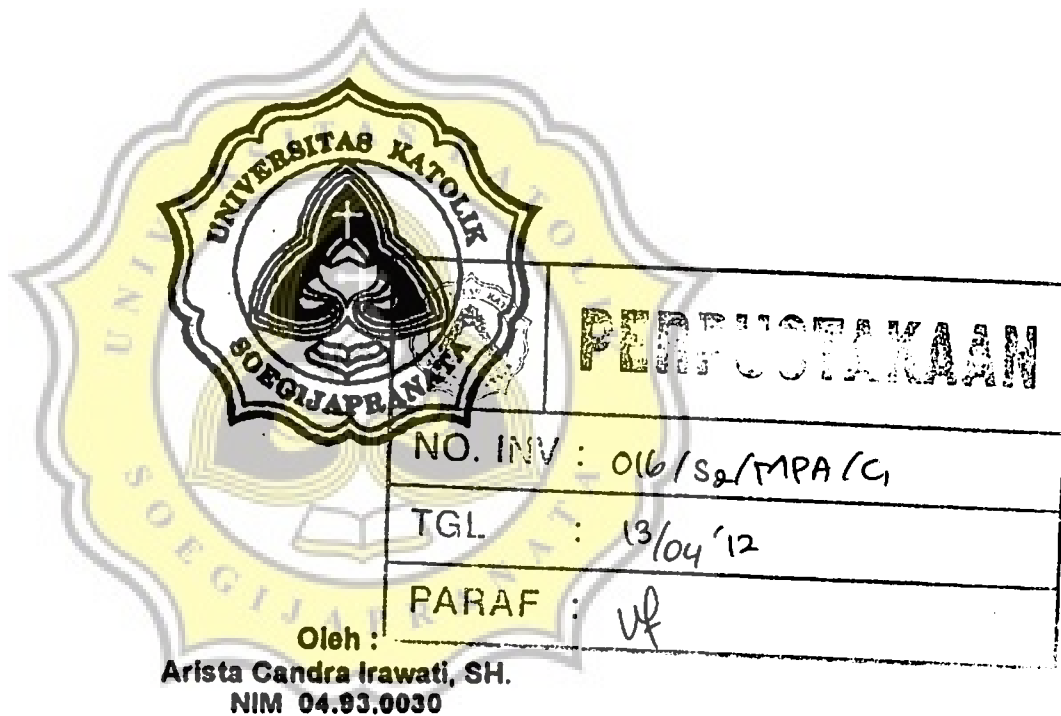


**KONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI  
PERKARA PRAPERADILAN**

**TESIS**  
**Diajukan**  
**Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 2**  
**Magister Hukum Konsentrasi Profesi Advokat**



**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2007**



**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**PROGRAM PASCASARJANA (S2)**  
**MAGISTER HUKUM PROFESI ADVOKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Semarang, 50234 Telp. 8316142 – 8441555 (Hunting) pesawat 201 - 202  
Fax. 8445265 Http:// [www.unika.ac.id](http://www.unika.ac.id) E-Mail : [pasca@unika.ac.id](mailto:pasca@unika.ac.id) Po.Box 8033/SM  
Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

**HALAMAN PERSETUJUAN**

N A M A : ARISTA CANDRA IRAWATI

N I M : NIM 04.93.0030

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Hukum

Bidang Konsentrasi : Profesi Advokat

JUDUL TESIS

KONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI  
PERKARA PRAPERADILAN

Semarang, .....

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

( Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH )

Dosen Pembimbing I

(Valentinus Suroto, SH. MHum )

Dosen Pembimbing II

( Andreas Hariyanto, SH. CN )



UNIVERSITAS KATOLIK  
**SOEGIJAPRANATA**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**KONSENTRASI PROFESI ADVOKAT**  
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429  
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis di susun oleh :

Nama : Arista Candra Irawati, SH

Nim : 04.93.0030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 15 Maret 2007

**Susunan Dewan Penguji**

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH
2. Valentinus Suroto, SH. MHum
3. Andreas Hariyanto, SH. CN

(.....*Harmit*.....)  
(.....*Mus*.....)  
(.....*Andreas*.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Profesi Advokat.

Pada tanggal : 15 Maret 2007



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM

(.....*Dr. A. Widanti S*.....)  
**Dr. A. Widanti S, SH. CN**

**Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat saya,

Arista Candra Irawati



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan berkatNya, Tesis ini yang berjudul KONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI PERKARA PRAPERADILAN, dapat diselesaikan. Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tersusun bukan atas usaha penulis sendiri, tetapi karena bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak. Secara tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Dr. Rudyanto Susilo, Direktur Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, SH. CN, Ketua Program Magister Hukum yang memberikan kesempatan dan peluang untuk menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH, Bapak Valentinus Suroto, SH. MHum serta Bapak Andreas Hariyanto, SH. CN atas kesediaannya meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya guna membimbing penulisan Tesis ini hingga selesai.
5. Bapak Suparno, SH, Direktur Pidana Mahkamah Agung RI dan Ibu Lilis SH, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi sumber informasi, yang telah membantu penelitian untuk penulisan Tesis ini.

6. Suami tercinta, Rudy S. SH, yang selalu memberikan do'a, cinta kasih, kesabaran dan perhatian yang tulus dalam mendampingi penulis dan turut membantu mencari data, guna melengkapi penelitian dalam penulisan Tesis ini.
7. Seluruh keluarga terkasih, Bapak, Ibu, Ananda Daniel Airlangga dan Yustina Maharani Budi Prastiwi, kadang-kadang ditinggalkan sendirian dan senantiasa memberikan dorongan, do'a dalam keberhasilan penulisan Tesis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman setia, Bhein Arini Yuniawati, SH dan Budi Utomo, SH, dengan kesabarannya selalu setia menemani, memberikan semangat dan kritikan dalam keberhasilan penulisan Tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan turut sertanya sehingga Tesis ini terselesaikan dengan lancar dan baik.

Sebagai hasil karya manusia, Tesis ini tentunya ada kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk penyempurnaannya.

Semarang, Maret 2007

Penulis,

Arista Candra Irawati

## ABSTRAK

Upaya hukum atas putusan praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHP, terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Meskipun permintaan pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali atas putusan praperadilan tidak diatur, Mahkamah Agung telah memutus permohonan tersebut. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UUMA) Pasal 45 A mengatur secara tegas kasasi terhadap putusan praperadilan tidak boleh dimohonkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian Mahkamah Agung dalam mengadili permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali atas putusan praperadilan dan mengetahui pelaksanaan upaya hukum kasasi atas putusan praperadilan setelah berlakunya UUMA.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dipergunakan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Obyek penelitian putusan praperadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang diambil dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 berjumlah 12 (dua belas) putusan. Putusan dipilih yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu yang menjadi tersangka seorang pejabat/mantan pejabat atau menyangkut perkara koneksitas. Untuk menyusun kesimpulan, data yang diperoleh dianalisis secara normatif-kualitatif.

Dari hasil analisis, diperoleh hasil sebagai berikut: Mahkamah Agung menerima upaya hukum kasasi atas putusan praperadilan dengan pertimbangan perkara yang belum ada yurisprudensinya, yaitu mengenai perkara koneksitas dan pelaksanaan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Sedangkan, menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena putusan praperadilan bukan sebagai putusan perkara pidana sesuai Pasal 244 KUHP. Dalam peninjauan kembali, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dengan menciptakan hukum baru. Perluasan pengertian mengenai putusan pengadilan dan "pihak ketiga yang berkepentingan" ditafsirkan setiap orang baik manusia pribadi maupun badan hukum. Dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan untuk kedua kalinya Mahkamah Agung mendasarkan adanya novum. Sedangkan, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena putusan praperadilan bukan putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pelaksanaan upaya hukum kasasi terhadap perkara praperadilan setelah berlakunya UUMA, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan pertimbangan menjalankan fungsi pengawasan. Sedangkan, permohonan kasasi atas perkara praperadilan tidak dapat diterima karena sesuai Pasal 45 A ayat (1) UUMA putusan praperadilan tidak dibatasi pengajuannya sebagai perkara yang dapat dikasasi.

Kata Kunci: Konsistensi, Mahkamah Agung, putusan praperadilan.



## ABSTRACT

The legal remedy on the sentence of pre-judicature is settled in clause section 83 of Criminal Code, toward the sentence of pre-judicature that draw up the illegal way to stop investigation or prosecution can be requested the last judgement to the Courthouse. Eventhough the demand of pronouncing the highest court's decision on a case and judicial review on the sentence of pre-judicature are not settled. The Supreme Court has sentenced the legal remedy in legislation 5/2004 about the alteration of legislation 14 / 1985, about the Supreme Court ( Legislation of the Supreme Court ) in clause section 45 A settles firmly the pronouncement of the highest Court's decision on a case toward the sentence of pre-judicature can not be requested. This research is to know the founding of the Supreme Court in administering the demand of the legal remedy investigation and the judicial review on the sentence of pre-judicature and to know the implementation of the legal remedy of pronouncing the highest court's decision on a case on the sentence of pre-judicature after putting the legislation of the Supreme Court into effect.

The research by using normative juridical approach, the utilized data is secondary data. The data collecting instrument is documentary study. The object of the research are the 12 sentences of the pre-judicature and the judicial review from 2000-2006. The sentence with special characteristic are chosen, such as the suspects of the case are the government official or the sentences concern the interconnection of jurisdiction case. To arrange conclusion, the data is analyzed normatively and qualitatively.

From the result of analyzing, can be known that the Supreme Court accepts the legal remedy of pronouncing the highest Court's decision on a case toward the sentence of pre-judicature with the consideration of the case without jurisdiction, such as interconnection of jurisdiction case and the implementation of *lex specialist*. Meanwhile, pronouncing the petition can not be accepted because the sentence of pre-judicature is not a criminal case according to in clause section 244 of Criminal Code in the judicial review, the Supreme Court fulfills the request by creating new law. The expansion of the meaning about the sentence of judicature and " The third party " are interpreted by everyone, not only as an individual human being but also as a corporate body. In fulfilling the request of judicial review that has been requested for the second time, the Supreme Court is based on the existence of novum. Meanwhile, the request of judicial review can be accepted because the sentence of pre-judicature is not the sentence of criminal case as mentioned in clause section 263 subsection (1) of Criminal case. The implementation of legal remedy of pronouncing the highest court's decision on a case with consideration of putting the functional supervision into effect. Meanwhile, the request of pronouncing the highest Court's decision on a case of pre-judicature can not be accepted because according to clause section 45 subsection (1) the legislation of the Supreme Court states that the sentence of pre-judicature is not limited on the submission as the case that can be pronounced.

Key words : Consistent, The Supreme Court, the sentence of pre-judicature.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Kerangka Konseptual.....	14
B. Kekuasaan Mahkamah Agung.....	14
C. Praperadilan.....	25
1. Wewenang praperadilan.....	25
2. Pihak - pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan.....	30
3. Tata cara pemeriksaan praperadilan.....	34
4. Isi putusan praperadilan.....	36

5. Upaya hukum atas putusan praperadilan.....	37
D. Penemuan Hukum.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Metode Pendekatan.....	53
B. Spesifikasi Penelitian.....	53
C. Obyek Penelitian.....	53
D. Jenis Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Analisis Data.....	56
G. Penyajian Tesis.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Putusan Mahkamah Agung No. 35 K/Pid/2002.....	60
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1060 K/Pid/2002.....	70
3. Putusan Mahkamah Agung No. 752 K/Pid/2002.....	72
4. Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/Pid/2004.....	76
5. Putusan Mahkamah Agung No. 570 K/Pid/2004.....	81
6. Putusan Mahkamah Agung No. 190 K/Pid/2005.....	85
7. Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Pid/2005.....	94
8. Putusan Mahkamah Agung No. 2282 K/Pid/2005.....	98
9. Putusan Mahkamah Agung No. 08 PK/Pid/2001.....	101
10. Putusan Mahkamah Agung No. 4 PK/Pid/2000.....	112
11. Putusan Mahkamah Agung No. 66 PK/Pid/2002.....	125
B. Pembahasan.....	132

1. Pendirian Mahkamah Agung dalam mengadili perkara...	
praperadilan.....	132
a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima.....	132
b. Permohonan kasasi dikabulkan.....	137
c. Permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak.....	
dapat diterima.....	146
d. Permohonan peninjauan kembali dikabulkan.....	151
2. Kasasi atas putusan praperadilan setelah berlakunya ....	
UU No. 5 Tahun 2004.....	171
a. Permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima..	174
b. Permohonan kasasi dikabulkan.....	179
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>187</b>
A. Kesimpulan.....	187
B. Saran.....	189
Daftar Pustaka.....	191